

**STRATEGI HUMAS DALAM MEYEBARLUASKAN
INFORMASI TENTANG PROGRAM KERJA
PEMERINTAH ACEH TENGGARA
TAHUN 2023**

SKRIPSI

OLEH:

RAY RAMADHAN MUNTHE
NPM. 1603110018

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : RAY RAMADHAN MUNTHE
NPM : 1603110018
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
Judul Skripsi : STRATEGI HUMAS DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI TENTANG PROGRAM KERJA PEMERINTAH ACEH TENGGARA TAHUN 2023

Medan, 31 Agustus 2023

PEMBIMBING


Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom

DISETUJUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI


AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : RAY RAMADHAN MUNTHE
NPM : 1603110018
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
Pada hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 08.00 WIB

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

(.....) 

PENGUJI II : Dr. ANANG ANAS AZHAR, M.A

(.....) 

PENGUJI III : Dr. SIGIT HARDIYANTO, S.Sos., M.I.Kom

(.....) 

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



PERNYATAAN



Dengan ini saya, Ray Ramadhan Munthe, NPM. 1603110018, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Agustus 2023
Yang Menyatakan



RAY RAMADHAN MUNTHE
NPM. 1603110018

ABSTRAK

STRATEGI HUMAS DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI TENTANG PROGRAM KERJA PEMERINTAH ACEH TENGGARA TAHUN 2023

**Oleh:
RAY RAMADHAN MUNTHE
NPM. 1603110018**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah, dan untuk mengetahui hambatan dalam strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di bagian Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dapat disimpulkan bahwa Strategi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya bagian humas Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara di antaranya melalui media massa, seperti media cetak dan media teknologi informasi, seperti surat kabar harian, baliho, spanduk, tabloid, media online dan media sosial. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara juga melakukan rencana yang optimal sebelum informasi program kerja disampaikan kepada masyarakat. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara juga menyajikan berita-berita seputar kegiatan yang telah dilaksanakan melalui website pemerintah sehingga informasi bisa cepat sampai kepada masyarakat. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara juga bekerjasama dengan wartawan serta dengan media massa agar informasi program kerja pemerintah dapat tersampaikan ke semua masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Hambatan yang terdapat dalam strategi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi program kerja.

Kata Kunci: Strategi Humas, Program Kerja Pemerintah

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA yang telah memberikan kemauan, kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Humas dalam Meyebarluaskan Informasi Tentang Program Kerja Pemerintah Aceh Tenggara Tahun 2023”** . Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta Senawati, yang selalu memberikan semangat dan selalu berdoa agar penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan perkuliahan dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP

3. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Sahabat penulis yaitu Rahman dan Ahmad yang telah menemani masa masa perkuliahan terima kasih atas dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih.

Medan, September 2023
Penulis

Ray Ramadhan Munthe

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Tinjauan tentang Strategi	7
1. Definisi Strategi	7
2. Proses Penyusunan Strategi	8
3. Tahap-Tahap dalam kegiatan Strategi	8
4. Manfaat Strategi	9
5. Tinjauan Tentang Humas di Lembaga Pemerintah	10
6. Tujuan Humas di Lembaga Pemerintah	13
7. Tinjauan tentang Pemerintah.....	14
8. Tinjauan tentang Media Relations.....	15
9. Tinjauan Tentang Informasi	19

10. Tinjauan Tentang Program Kerja	22
11. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Subjek dan Objek Penelitian	25
D. Informan Penelitian	26
E. Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Lokasi Penelitian	29
1. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Tenggara.....	29
2. Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Tenggara.....	29
B. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.....	32
C. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	36
D. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Komunikasi Media Relations.....	18
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : Surat Pernyataan
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran V : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran VI : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VIII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran IX : Pedoman Wawancara
- Lampiran X : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran XI : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Rio Muhammad “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Klanten, wajib bagi pemerintah untuk menerapkan ke sembilan prinsip Good Governance, agar dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan Good Governance, dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik. Prinsip-prinsip dari Good Governance yaitu adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, keadilan, kesetaraan, konsensus, visi misi yang strategis, efektif dan efisien.

Keterbukaan atau transparansi merupakan salah satu dari ke sembilan prinsip Good Governance yang wajib diwujudkan oleh pemerintah kepada publik. Salah satunya yaitu keterbukaan informasi publik, baik itu informasi tentang kebijakan, program kerja, pemabangunan dan kegiatan pemerintah. Sesuai dengan Undang–Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak memperoleh informasi publik, dan menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan, serta proses pengambilan keputusan yang

dilakukan oleh pemerintah. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (KIP).

Keterbukaan informasi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Apapun bentuk informasi yang disebarluaskan oleh pemerintah, publik berhak untuk mengetahui. Pada dasarnya informasi dari pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan tersebarluaskan informasi, masyarakat bisa mengetahui dan mengerti tentang kegiatan yang sedang dilakukan pemerintah.

Partisipasi masyarakat juga menjadi penentu dalam mencapai keberhasilan program kerja pemerintah yang telah ditetapkan, karena tanpa adanya peran serta masyarakat program kerja dari pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik. Masyarakat mempunyai hak penuh untuk mengetahui informasi program kerja dari pemerintah, karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. pemerintah juga harus menerima masukan dari masyarakat untuk memperoleh partisipasi dan dukungan dari masyarakat.

Menurut Muhammad Aras kegiatan government publik relation dalam membangun komunikasi Di lembaga pemerintah humas berperan sebagai pengelola informasi dan penyebaran informasi, seperti informasi program kebijakan, program kerja, pembangunan dan kegiatan pemerintah. Dapat dikatakan humas sebagai bentuk pemberi pelayanan administratif dalam bidang

informasi kepada masyarakat, sehingga dengan itu masyarakat dapat menaruh kepercayaan kepada pemerintahnya yang telah diberi tanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara khususnya bagian Humas bertanggungjawab dalam memberikan informasi dan sekaligus sebagai tempat bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah, sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, karena pada dasarnya di lembaga pemerintah humas berfungsi untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara pemerintah dengan masyarakat, yang akan mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan kinerja pemerintah.

Menurut *Peluncuran Daftar Informasi Publik Kabupaten Aceh Tenggara*, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, bahwa pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah mewujudkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakatnya secara cepat, tepat dan akurat. Karena telah menjadi kewajiban badan publik Negara untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara,

Menurut *Lauching Daftar Informasi Publik (DIP)*, Salah satu wujud usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu dengan cara melaunching Daftar informasi publik (DIP) dalam rangka mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Tersedianya daftar informasi publik (DIP) baik yang terbuka maupun yang dikecualikan dapat menjadi pedoman bagi jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mengelola informasi yang kredibel dan akuntabel sehingga salah satu tujuan tata kelola pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan hadirnya pemerintahan yang Clean Government.

Permasalahan humas pemerintahan kini berasal dari faktor eksternal maupun internal. Minimnya pemahaman soal otonomi daerah menjadi salah satu persoalan yang dihadapi terutama oleh humas pemerintah. Hal itu menggambarkan permasalahan berdasarkan faktor eksternal. Misal ada jalan rusak di RT sekian RW sekian di Aceh Tenggara, tapi yang dikomplain Menteri PU (Pekerjaan Umum). Karna kurangnya informasi secara detail dari humas pemerintah. Mengakibatkan hubungan masyarakat dan humas tidak berjalan dengan semestinya. Permasalahan internal berada di tataran sumber daya manusia. Biro komunikasi standarnya di gabung dengan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik yang masih satu tema. Tetapi ada beberapa lembaga yang menggabungkan humas dengan bagian hukum atau bagian kerja sama internasional sehingga kepala biro dipilih dari yang berlatar belakang.

Masalah mekanisme birokrasi. Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan banyak memiliki program multiyears. Sayangnya, program itu tidak disenadakan dengan kegiatan kehumasan yang multiyears. Seringkali di awal tahun humas pemerintahan jarang memiliki agenda, jadi kontinuitas program menjadi persoalan, Maka hal ini membuat peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam tentang “Strategi Humas dalam Meyebarluaskan Informasi Tentang

Program Kerja Pemerintah Aceh Tenggara Tahun 2023”. Dengan mengetahui strategi yang ditetapkan dalam menyebarluaskan informasi publik dapat lebih mudah untuk memahami daftar informasi publik (DIP) yang di launching oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menunjang keterbukaan informasi dan memudahkan publik.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah daerah?
2. Hambatan-hambatan dalam strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan tentang program kerja pemerintah daerah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan yang dikaji lebih lanjut untuk mengetahui arah penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam strategi humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah daerah?

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Akademik, untuk menambah sumber referensi yang bermamfaat dalam penelitian selanjutnya di bidang humas sebagi pusat informasi.
2. Secara Sosial, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai bentuk informasi bahwasannya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah semaksimal mungkin dalam mencoba menganyomi dan melayani masyarakat salah satunya pelayanan akan informasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

B. Tinjauan tentang Strategi

12. Definisi Strategi

Menurut Butterick Keith (2014:153), Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang artinya adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi strategi menentukan lingkup dan arah suatu pengembangan organisasi dalam menentukan strategi yang kompetitif.

Tjiptono Fandi, Chandra Gregorius (2012), Peranan dan kontribusi strategi tidak terbantahkan karena riset tentang strategi sudah dilakukan selama beberapa dekade, sehingga saat ini belum ada kepastian mengenai pendapat tentang strategi, dikarenakan dua faktor yang pertama, strategi bersifat multidimensional, dan yang kedua strategi bersifat situasional.

Menurut Butterick Keith (2014;153), Strategi merupakan sebagai sebuah pengambilan keputusan menyangkut tiga parameter utama, yang pertama siapa yang menjadi target dan siapa yang tidak akan di target, yang kedua produk dan jasa apa yang ditawarkan kepada masyarakat, dan sasaran produk dan jasa apa yang tidak akan ditawarkan, yang ketiga aktivitas apa yang akan dan tidak akan dilakukan dalam rangka mewujudkan itu semua. Pentingnya pilihan strategi menyangkut apa yang bakal menjadi fokus organisasi dan apa yang tidak akan dilakukan organisasi.

Menurut Ceverthon Peter (2015:1), Strategi dapat dikatakan juga cara yang alternatif yang dipilih untuk di tempuh guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi merupakan bagian penting dalam mengembangkan semua jenis kegiatan organisasi, strategi dapat dikatakan sebuah metode atau cara yang digunakan oleh organisasi untuk bergerak dari satu posisi keposisi yang lain, maka dari itu strategi menjadi peta jalannya sebuah organisasi.

13. **Proses Penyusunan Strategi**

Menurut Abdurrahman Nana Herdiana, (2015:14). Landasan umum dalam proses penyusunan strategi yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah yang muncul
- b. Mengevaluasi mengenai pola dan kadar pada unit sasarannya
- c. Mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran
- d. Memilih beberapa strategi
- e. Mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan atau perturan pemerintah dan lain sebagainya
- f. Mengkomunikasikan dan penilaian atau evaluasi hasil kerja

14. **Tahap-Tahap dalam kegiatan Strategi**

- a. Penemuan Fakta

Pada tahap ini dilakukan penemuan fakta dilapangan atau hal-hal yang berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi masyarakat dengan kebijaksanaan pihak pemerintah. Setelah menemukan fakta dilapangan, maka data, fakta, dan informasi tersebut dievaluasi untuk dapat dijadikan pengambilan keputusan.

b. Perencanaan dan Penyusunan Program Kerja

Pada tahap ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang sejalan dengan kepentingan publik.

c. Penyampaian Pesan

Proses ini merupakan tindak lanjut setelah melakukan perencanaan. Pada tahap ini organisasi harus bisa melakukan tindakan berdasarkan rencana matang yang sudah dibuat. Tindakan dilakukan sesuai dengan fakta yang sudah ada sehingga dapat menyampaikan pesan dengan efektif yang dapat mempengaruhi masyarakat.

d. Komponen sasaran

Komponen sasaran pada umumnya adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan yang disebut juga publik sasaran (target sasaran). Komponen sasaran yang ada pada strategi pemerintah pada dasarnya berfungsi untuk mengarahkan informasi atau pesan tersebut keposisi yang telah ditargetkan sebelumnya yaitu masyarakat luas.

e. Evaluasi

Evaluasi adalah tahap penilaian hasil dari riset awal sehingga perencanaan program, serta keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi yang digunakan. Tahap ini dikatakan sebagai tahap penafsiran hasil kerja.

15. **Manfaat Strategi**

Penetapan strategi dalam sebuah organisasi dapat memberi manfaat dalam sebuah organisasi, manfaat dari strategi yaitu sebagai berikut :

a. Membantu dan membuat organisasi menjadi lebih efektif.

- b. Mengidentifikasi keunggulan komprehensif bagi organisasi
- c. dalam lingkungan yang semakin beresiko
- d. Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan
- e. organisasi untuk mencegah terjadinya masalah di masa akan datang
- f. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih
- g. memotivikasi mereka pada tahap pelaksanaan strategi

16. **Tinjauan Tentang Humas di Lembaga Pemerintah**

a. Definisi Humas

Menurut Mukarom Zaenal, Wijaya Laksana Mahibuddin (2015:38). Di lembaga pemerintahan humas berperan sebagai penyampaian informasi. Keberadaan humas di lembaga pemerintah merupakan suatu keharusan, dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penyebaran informasi, seperti informasi tentang kebijakan, program kerja, pembangunan dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Ruslan, Rosady (2017:26), Humas atau public relation merupakan sebagai segala bentuk kegiatan manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajemen secara keseluruhan, seperti pengorganisasian perencanaan, kepemimpinan, dan penelitian. Humas atau publik relations adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis, menasehati, menasehati pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan kegiatan yang melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan public.

b. Peran Humas di Lembaga Pemerintah

Peran humas di lembaga pemerintah sangat berkaitan dengan tujuan utama yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, pada dasarnya humas harus bisa memberikan identitas organisasinya dengan tepat dan benar, serta mengkomunikasikannya sehingga dengan itu publik menaruh kepercayaan dan

mempunyai pemahaman yang jelas tentang organisasi tersebut. Adapun konsep dari perannya humas di lembaga pemerintah diantaranya:

- 1) Dapat mempengaruhi individu, kelompok atau masyarakat, dan akan menjadi sasaran dengan tujuan untuk mengubah dan mempengaruhi pendapat dan opini publik melalui kegiatan komunikasi Public Relation.
- 2) Sebagai upaya untuk pemulihan terhadap suatu kegagalan yang telah terjadi sehingga menimbulkan citra negatif organisasi, dan tindakan humas selanjutnya adalah upaya pemulihan kembali nama baik pemerintah di mata masyarakatnya.

c. Fungsi Humas di Lembaga Pemerintah

Humas di lembaga pemerintah berfungsi membantu dan meningkatkan marketing, terutama promosi citra organisasi, akan tetapi humas bukan hanya membantu tetapi juga mempunyai aktifitas pemasaran lainnya. Sesungguhnya humas memiliki tanggung jawab menejer sesuai dengan fungsinya terhadap masyarakat.

Terdapat tiga fungsi humas dalam menyelenggarakan komunikasi dua arah, yang secara lebih terperinci yaitu:

- 1) Memberikan penerangan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga pemerintah dan kepentingan khalayak.
- 2) Mengukur dan menafsirkan pendapat, sikap, perilaku masyarakat terhadap lembaga pemerintah sehingga tercapainya visi misi dari pemerintah.
- 3) Melaksanakan dan mengembangkan setiap program yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan saling pengertian antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjalinnya kerja sama.
- 4) Tugas Humas Di Lembaga Pemerintah

Tugas humas merupakan kerja keras yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh praktisi humas di tempat mereka bekerja. Adapun tugas yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program kerja, pembangunan, dan kegiatan pemerintah.
- b) Mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat.
- c) Menyampaikan informasi kebijakan, program kerja, pembangunan, kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada masyarakat.
- d) Menampung aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program kerja, pembangunan dan kegiatan pemerintah.

17. Tujuan Humas di Lembaga Pemerintah

Menurut Kriyantono Rachmat (2018:6), Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, dituju atau diraih, tujuan merupakan sesuatu yang ingin dituju oleh humas, sehingga dengan adanya tujuan tidak melenceng dari sasaran. Seorang praktisi humas harus merumuskan tujuan secara jelas, spesifik, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis tentang apa saja yang mesti dicapai oleh humas dalam periode waktu tertentu.

Tujuan humas di lembaga pemerintah antara lain ialah menciptakan pemahaman publik, membangun citra koporat, membangun opini publik yang baik, serta membentuk kerja sama dengan media relations. Tujuan humas yang perlu dicapai yaitu sebagai berikut:

- 1) Menciptakan pemahaman, berupaya menciptakan saling pengertian antara organisasi dan publik.
- 2) Membangun citra koporat, citra adalah pendapat publik tentang organisasi yang menyangkut tentang pelayanan, kualitas produk, budaya dalam organisasi dan lainnya.
- 3) Membentuk opini publik, opini publik merupakan ekspresi publik mengenai persepsi dan sikap terhadap organisasi.
- 4) Membentuk kerja sama, pada tahap ini humas sudah pada tahap tindakan nyata, artinya sudah tercipta jalinan kerja sama dalam bentuk perilaku tertentu yang mendukung keberhasilan organisasi.

18. Tinjauan tentang Pemerintah

a. Definisi Pemerintah

Menurut Cristine, Khansil (2015:17), Pemerintah adalah sebagai alat Negara untuk menjalankan tugasnya. istilah pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit di maksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif sedangkan pemerintah dalam arti luas ialah semua organ Negara termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut H.A.W Widjaja (2014:37), Dalam penyelenggaraan pemerintah presiden dibantu oleh wakil presiden dan harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan serta peran dari masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Abdullah Rozali (2015:27), Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang dalam hukum administrasi dikenal dengan “asas-asas umum pemerintahan yang layak”, pemerintah daerah diberi hak

dan kewajiban dalam menjalani pemerintahannya, hak dan kewajiban daerah tersebut antara lain:

- 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- 2) Memilih pemimpin daerah
- 3) Mengelola aparatur daerah
- 4) Mengelola kekayaan daerah
- 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- 6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah
- 7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- 8) Mendapatkan hak lain yang diatur dalam peraturan per Undang-Undangan.

19. **Tinjauan tentang Media Relations**

Media relations merupakan salah satu program humas untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. peran media sangat berpengaruh dalam pembentukkan citra pemerintah yang baik di mata masyarakat, karena produk dari media berupa berita yang akan dikonsumsi langsung oleh masyarakat.

Pemberitaan yang kurang baik akan berdampak kurang baik juga terhadap citra pemerintah, begitupun sebaliknya berita yang baik akan membawa dampak yang baik juga terhadap citra pemerintah. Oleh sebab itu, humas di lembaga pemerintah harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan media, yaitu dengan memberikan informasi atau berita kepada setiap media yang sesuai dengan fakta.

Menurut Iriantara, Yosal (2018:45), Perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap bentuk-bentuk media massa memberikan pengaruh yang berarti bagi pemerintah. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan yang baik pula bagi pemerintah, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang organisasi pemerintah.

Pengertian media relations berdasarkan hubungan pemerintah dengan masyarakat dan dengan media, sehingga dapat disimpulkan pengertian media relations adalah hubungan yang dibangun dan dikembangkan dengan media untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan masyarakat maupun pemerintah. Dalam menyebarkan informasi pemerintah, humas membutuhkan dukungan media dalam strategi penyebaran informasi. Terdapat beberapa jenis media relations sebagai media-media utama bagi kegiatan humas dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat di antaranya :

- a. Media Pers, media pers merupakan media yang terdiri dari media cetak yaitu koran, majalah, buku petunjuk khusus, buku tahunan, dan laporan tahunan yang diterbitkan secara umum.
- b. Media teknologi informasi, merupakan media yang terdiri dari media online dan media sosial.
- c. Audio Visual merupakan media yang berbentuk kaset video atau gabungan film-film dokumenter.
- d. Radio, radio merupakan media yang meliputi semua jenis radio lokal maupun nasional yang dipancarkan secara luas.

- e. Televisi, televisi merupakan media penyebaran informasi dapat melalui televisi nasional maupun regional.
- f. Pameran, dengan adanya pameran, humas dapat memanfaatkan pameran yang diadakan disuatu tempat untuk memperkenalkan produk.

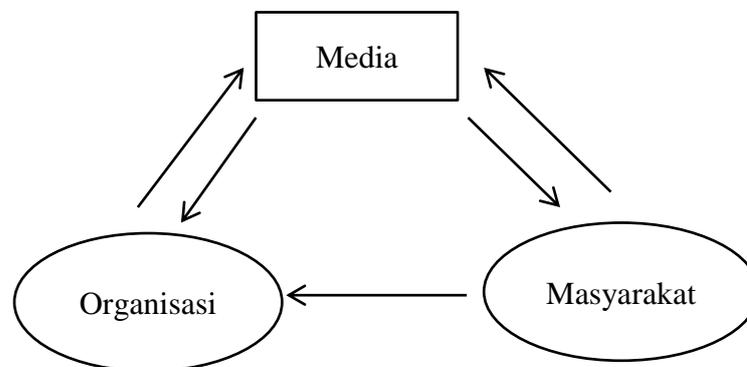
Menurut Coulson, Thomas Chollin (2015:34), Masih banyak bentuk-bentuk dari media relations. Seiring dengan revolusi waktu dan kemajuan teknologi, bisa dipastikan bahwa media tersebut akan semakin bervariasi di masa akan datang.

Media relations menjadi penting bagi kegiatan dan program humas di karenakan memiliki kekuatan, bukan sekedar mampu menyampaikan pesan kepada jutaan khalayak sekaligus, namun juga dapat mendidik, mempengaruhi, menginformasikan, dan menghibur. Media juga memiliki potensi untuk membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, serta dapat mengubah pendapat dan perilaku.

Menurut Kriyantono Racmat (2008:6), Komunikasi yang harmonis antara humas dengan publik akan berjalan dengan baik jika didukung dengan komunikasi yang jujur, dengan memanfaatkan media sebagai sarana penyebarluasan informasi. Dalam menjalin hubungan baik dengan media, humas tidak boleh menutup mata sehingga humas harus menerapkan prinsip-prinsip untuk menjalin serta menjaga hubungan baik dengan pers, salah satunya dengan cara:

- 1) Melayani media, agar terciptanya hubungan yang baik, melayani dan memahami apa kebutuhan media menjadi hal yang utama
- 2) Menyediakan salinan yang baik, salinan ini dapat berupa data tertulis, foto serta video
- 3) Bekerjasama dalam penyediaan materi.

Gambar 1. Alur Komunikasi Media Relations



Dari gambar tersebut jelas menunjukkan, organisasi menyampaikan informasi, gagasan atau citra melalui media massa kepada publik. Sedangkan publik, bisa menyampaikan aspirasinya, harapan, keinginan atau informasi melalui media massa pada organisasi. Media massa bukan hanya sekedar mampu untuk menyampaikan suatu pesan kepada publik, namun juga memiliki fungsi untuk mendidik, mempengaruhi, menginformasikan dan menghibur. Maka dari itu media massa juga memiliki potensi untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, membangkitkan kesadaran, serta dapat mendorong tindakan.

a) Manfaat Media Relations

Manfaat dari media relations adalah untuk publisitas, yang merupakan suatu upaya untuk mempublikasikan suatu informasi yang berasal dari humas agar masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, penggunaan media relations akan sangat Organisasi Masyarakat Media menentukan keberhasilan pelaksanaan humas dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah yang disesuaikan dengan sasaran publik.

b) Tujuan Media Relations

Menurut M. Yunup Pawit (2015:11), Perusahaan atau organisasi yang menggunakan media relations merupakan organisasi yang membutuhkan dukungan dari media dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari pada media relations diataranya :

- 1) Untuk memperoleh publisitas seluas-luasnya terhadap informasi yang disebarluaskan
- 2) Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liput, laporan, ulasan).
- 3) Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan lembaga.
- 4) Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh saling percaya dan menghormati.

20. **Tinjauan Tentang Informasi**

a. Definisi Informasi

Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau disebut juga dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh seseorang yang berupa pernyataan,

gagasan pendapat, baik berupa data maupun fakta dilapangan, yang disediakan dalam berbagai bentuk jenis format.

b. Jenis Informasi

Jenis informasi sangat beragam, baik dalam jenis, tingkat, maupun bentuknya. Informasi biasa yang banyak tersedia di mana-mana, sebenarnya jenis informasi biasa bisa berubah menjadi informasi yang luar biasa atau bahkan menjadi penting kedudukannya jika hal tersebut berkaitan dengan peristiwa besar di masyarakat. Jenis informasi bisa digunakan untuk memudahkan arah dalam mengelompokkan informasi tersebut sesuai dengan sifat dan karakteristik yang dimiliki. Di samping itu, bisa digunakan untuk mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan di dunia yang menjadi pusat informasi, bahkan dilingkungan masyarakat sendiri.

c. Manfaat Informasi

Menurut Moch Irfan (2014:87), Informasi dikatakan bernilai jika informasi tersebut dapat memberi manfaat ke pada banyak orang. Adapun manfaat dari informasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menambah pengetahuan. Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung proses pengambilan keputusan.
- 2) Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena hal-hal yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya sehingga dapat menghindari keraguan pada saat pengambilan keputusan.
- 3) Mengurangi resiko kegagalan. Adanya informasi resiko kegagalan akan

dapat diantisipasi dengan baik sehingga kegagalan dapat dikurangi dengan cara pengambilan keputusan yang tepat.

- 4) Memberikan standar, aturan, ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian sasaran, yang telah ditetapkan secara lebih baik berdasarkan informasi yang di peroleh.

d. Bentuk informasi

Informasi pada masa sekarang tidak hanya sebagai pengumpulan data dan pengolahannya menjadi informasi. Tetapi juga mempunyai peranan yang lebih penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsifungsi perencanaan, alokasi sumber daya, pengukuran, dan pengendalian. Bentuk dari informasi tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Informasi pengumpulan data, yaitu Informasi berupa akumulasi atau disebut juga sebagai pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan.
- 2) Informasi pengarahan perhatian yaitu informasi untuk membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah yang menyimpang.

e. Sumber Informasi

Informasi ada di mana-mana baik itu di lingkup masyarakat, lembaga, majalah, surat kabar, dan di tempat-tempat lainnya, di mana peristiwa tersebut terjadi akan tercipta informasi, sumber-sumber informasi banyak jenisnya, seperti buku, majalah, surat kabar, radio, televisi, dan media rekaman informasi lainnya, itu merupakan tempat disimpannya atau disebut juga dengan sumber-sumber informasi khususnya informasi terekam.

21. Tinjauan Tentang Program Kerja

a. Definisi Program Kerja

Program kerja adalah susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan. Program kerja akan menjadi tolak ukur pencapaian kinerja, adapun pertanggungjawaban program kerja biasanya dilakukan pada akhir pengurusan dengan format laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota institusi. Pada dasarnya program kerja harus dirancang secara terperinci, terarah dan sistematis., karena pada hakikatnya program kerja sebagai pegangan dalam mencapai tujuan organisasi.

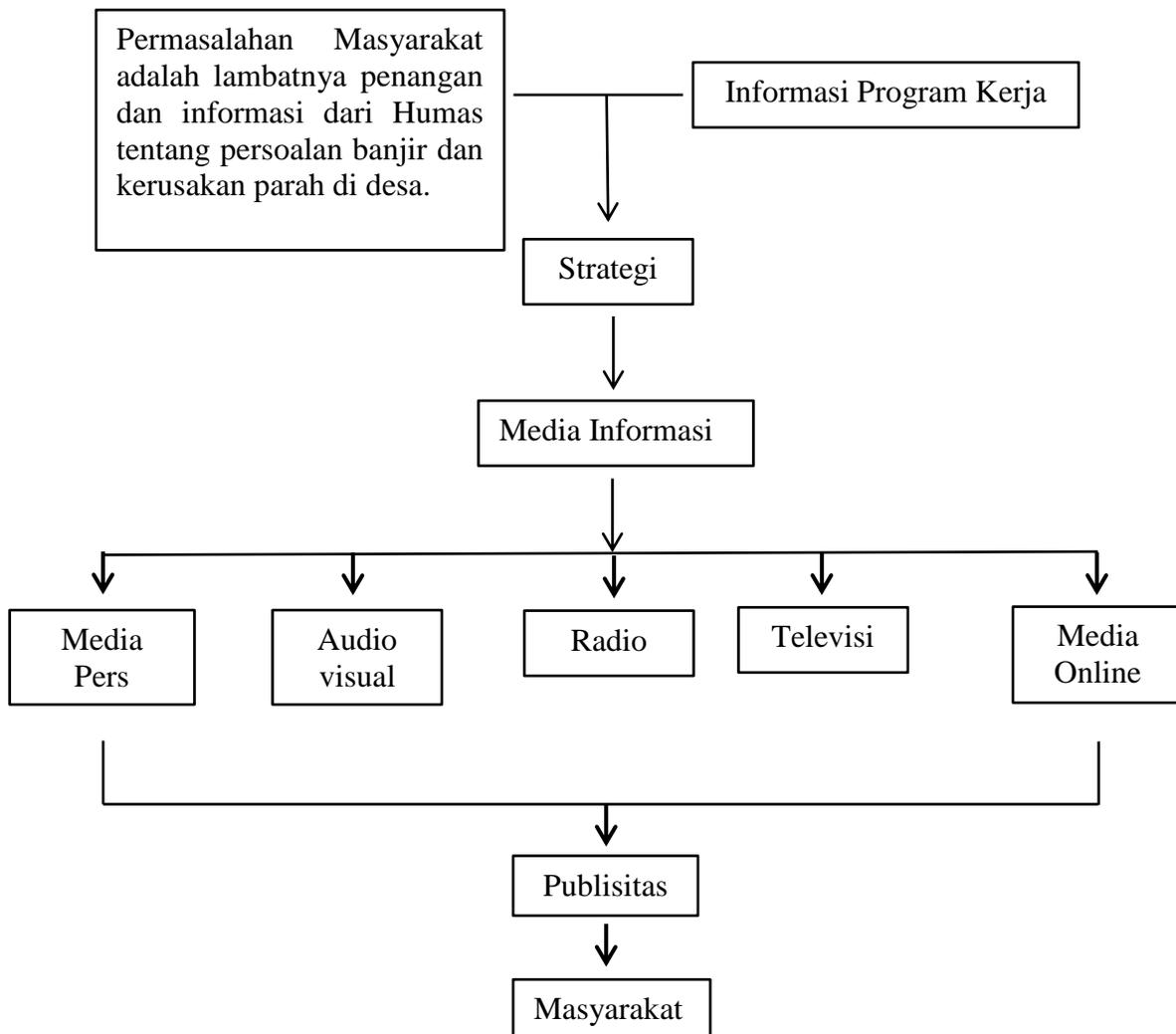
b. Tahapan Penyusunan Program Kerja

Perencanaan (planning) merupakan hal terpenting dalam penyusunan program kerja, sebab perencanaan dibuat karena sudah mendapatkan informasi yang sedang berlangsung, evaluasi yang telah dilakukan dengan berorientasi memandang jauh ke depan. Perencanaan adalah awal untuk bertindak, dengan langkah kecil bisa membuat sesuatu menjadi besar. Setelah program kerja disusun maka dibahas pada rapat kerja selanjutnya dikembangkan melalui pembagian tugas (organizing and staffing), setelah itu diberikan arahan (directing) serta dilakukan pengawasan (controlling) agar terarah sesuai dengan program kerja yang telah dibuat bersama.

Langkah dalam menyusun program kerja yang efektif dan berdampak adalah sebagai berikut:

- 1) Tentukan tujuan dengan jelas, kejelasan merupakan hal utama dalam membuat program kerja. Tujuan yang tidak jelas akan menjadi hambatan dalam menuju kesuksesan.
- 2) Tuliskan dan ukur tujuan, setelah memiliki tujuan tuliskan tujuan dengan jelas untuk mengukur kelayakan dari tujuan tersebut.
- 3) Tentukan target waktu, membuat target waktu akan membantu organisasi dalam mengambil tindakan sesuai dengan rencana organisasi.

22. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Dari skema diatas dapat digambarkan pola kerangka pemikiran penelitian ini adalah Humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai pengelola informasi dan sebagai penyebarluasan informasi kepada masyarakat, yang akan menjembatani kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. informasi tersebut mengharuskan humas untuk mempunyai strategi yang efektif, agar dapat terjalin hubungan baik dengan media, maka dari itu informasi dapat tersebarluaskan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan media kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

H. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk menjelaskan tentang “Strategi Humas dalam Menyebarkan Informasi Tentang Program Kerja Pemerintah Aceh Tenggara Tahun 2023”. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

I. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor bupati Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di bagian Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara, yang beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2023 sampai tanggal 19 Juli 2023.

J. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang akan menjadi sumber data. Informan dalam penelitian ini ialah pihak humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terlibat langsung dengan pengelolaan dan penyebaran informasi tentang program kerja pemerintah daerah.

2. Objek Penelitian

Dalam setiap penelitian penulis membutuhkan objek penelitian, objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang hendak dikaji dalam sebuah penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah “Strategi Humas dalam Menyebarluaskan Informasi Tentang Program Kerja Pemerintah Aceh Tenggara Tahun 2023”.

K. Informan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian, maka informasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian humas dan pegawai Humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang berjumlah sembilan orang. Penulis gunakan adalah purposive sampling artinya dengan cara mengambil subjek penelitian bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga penulis tidak mengambil semua sampel penelitian.

L. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan kepala bagian humas dan staf humas dan observasi yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada di bagian Humas.

M. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti antara lain :

1. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, untuk melihat kondisi riil yang terjadi pada bagian humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu pihak Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti website pemerintah, informasi yang telah dimuat di media massa dan melalui teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.

N. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara memahami data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang paling penting dan selanjutnya dapat dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Setelah berhasil mengumpulkan data dari lokasi penelitian, langkah selanjutnya ialah menganalisis dan kemudian menyajikan secara tertulis dalam karya ilmiah. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, *data conclusion drawig/verification*.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data dalam penelitian ini artinya merangkum atau mencari pokok-pokok yang paling penting dari setiap data yang diperoleh, jika data yang diperoleh dilapangan semakin banyak maka peneliti harus memfokuskan pokok permasalahannya saja. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Data Conclusion Drawig/Verification*)

Selanjutnya menyimpulkan hasil yang telah di uraikan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara lebih multikultural dibandingkan Aceh bagian tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues) yakni didiami oleh lebih dari 3 suku yaitu : suku Alas sebagai suku tempatan diikuti oleh suku-suku pendatang seperti suku Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee. Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, dimana mempunyai masyarakat yang majemuk tetapi hampir tidak ada terdengar sama sekali kerusuhan yang melibatkan SARA (Suku, Agama dan Ras). Masyarakatnya mampu menjaga perdamaian sampai saat ini.

3. Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Tenggara

Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"–4016'37" LU dan 96043'23"–98010'32" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari

wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 Celsius, dengan luas wilayah 4.231.43 km². Dalam sejarah panjang pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermula dari disusunnya pemerintahan di seluruh Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada “di tengah” Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon, sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki, atau kalau menggunakan kendaraan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif. Terlebih lagi pada tanggal 21 September 1953 meletus Peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara.

Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas. Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam propinsi

Sumatera Utara dan memutuskan untuk mengembalikan status propinsi kepada Aceh.

Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowi I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Mayor Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Mayor Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Bupati berikutnya setelah H. Syahadat (menjabat sejak tahun 1975 sampai 1981) adalah T. Djohan Syahbudin, SH, (periode 1981-1986), Drs. H. T. Iskandar, (periode 1986-1991), Drs. H. Syahbuddin BP (periode 1991-2001), H. Armen Desky (periode 2001-2006), Ir. Hasanuddin B dan Drs.H.Raidin Pinim (2017 –sekarang).

Kemudian pada tanggal 10 April 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal sebagai Lembah Alas, sangat kaya akan objek-objek wisata. Pengembangan pariwisata di Aceh Tenggara diarahkan pada pemanfaatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penekanan pada pariwisata alam (natural tourism). Sasaran dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dari tahun ke tahun.

F. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara

Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian asisten administrasi umum yang berjumlah sebanyak 9 orang, yang diantaranya 6 orang ASN dan 3 orang tenaga honorer. Staf bagian humas yang dipimpin oleh seorang kepala humas, dan dibantu oleh 3 orang sub bagian humas, yang bertanggungjawab kepada bagian humas yaitu : Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi, Sub Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Data, dan Sub Bagian Publikasi dan Media Elektronik.

1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

Sub bagian pengumpulan informasi dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan berita dan informasi, peliputan dokumentasi dan penyebarluasan informasi melalui media cetak maupaun melalui media teknologi informasi, untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah, program kerja, pembangunan dan kegiatan pemerintah, dan mendistribusikan bahan-bahan penerbitan serta mengkoordinasikan dokumentasi pelaksanaan tugas bidang kehumasan.

2. Sub Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Data

Sub bagian pemberitaan dan pengelolaan data mempunyai tugas melakukan urusan peliputan, pemberitaan, dan mengelola data serta mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan pekerjaan.

3. Sub Bagian Publikasi dan Media Elektronik

Sub bagian publikasi dan media elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasi kegiatan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan hubungan kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun dalam bentuk publikasi media elektronik.

1) Tupoksi Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara

Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas yaitu, melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang informasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi antara lain ialah:

1. Menyusun rencana operasional kegiatan dan program kerja bagian humas berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
2. Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan
3. Pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan.
4. Penyimpan bahan pembinaan dan pengamanan hubungan masyarakat
5. Hubungan antar lembaga.
6. Pelaksanaan hubungan media massa dan pers, peliputan dan
7. Pemberitaan dan menganalisa informasi untuk penerangan, penerbitan,
8. Publikasi, dan dokumentasi informasi komunikasi.
9. Melaksanakan kegiatan dan program kerja pengolahan data elektronik, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.

2) Standar Pelayanan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan standar pelayanan.

Standar pelayanan pada bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

1. Standar pelayanan pendokumentasian naskah, foto, dan audio visual;
2. Standar pelayanan peliputan kegiatan pimpinan daerah;

3. Standar pelayanan pengumpulan dan pemantauan berita media cetak;
4. Standar pelayanan konsultasi/audiensi
5. Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan.
6. Penyimpan bahan pembinaan dan pengamanan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
7. Pelaksanaan hubungan media massa dan pers, peliputan dan pemberitaan dan menganalisa informasi untuk penerangan, penerbitan, publikasi, dan dokumentasi informasi komunikasi.

Melaksanakan kegiatan dan program kerja pengolahan data elektronik, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.

- 1) Standar Pelayanan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan standar pelayanan. Standar pelayanan pada bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :
 - a) Standar pelayanan pendokumentasian naskah, foto, dan audio visual;
 - b) Standar pelayanan peliputan kegiatan pimpinan daerah;
 - c) Standar pelayanan pengumpulan dan pemantauan berita media cetak;
 - d) Standar pelayanan konsultasi/audiensi

G. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara di pimpin oleh seorang bupati yang saat ini dijabat oleh bapak Ramli Ms. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kabupaten Aceh Tenggara melakukan peningkatan pembangunan di segala bidang, baik dari segi perekonomian, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Visi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada periode 2017-2022 adalah “Terwujudnya Aceh Barat yang islami, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas” Terwujudnya Aceh yang islami adalah visi yang pertama pemerintah kabupaten Aceh Tenggara, guna membangun masyarakat yang beriman, bertakwa berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengedepankan nilai-nilai islami, serta mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai islami dalam tatanan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat secara efektif Pembangunan infrastruktur, infrastruktur merupakan organ yang sangat penting demi kelangsungan hidup dalam setiap daerah. Dengan adanya infrastrukurt akan terbukanya akses dalam menjangkau setiap daerah, dan akan memberi kemudahan dalam arus pengiriman barang baik dari dalam maupun dari luar daerah.

Adapun Misi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada periode 2022-2023 adalah :

- a. Mengembalikan Kabupaten Aceh Tenggara yang syar’i dan mewujudkan pemerintahan Aceh Tenggara yang bersih;

- b. Mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila, UUD 1945.
- c. Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA;
- d. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti aparatur sipil Negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan teungku dayah;
- e. Mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya, adat dan adat-istiadat;
- f. Membangun prasarana dan sarana infrastruktur pendukung islam mewujudkan Aceh Tenggara sebagai zona ketahanan pangan nasional;
- g. Memberikan pelayanan kesehatan serta meningkatkan sumber daya alam (SDA) bidang kesehatan ;
- h. Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Tenggara.

2. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara

Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian asisten administrasi umum yang berjumlah sebanyak 9 orang, yang diantaranya 6 orang ASN dan 3 orang tenaga honorar. Staf bagian humas yang dipimpin oleh seorang kepala humas, dan dibantu oleh 3 orang sub bagian humas, yang bertanggungjawab kepada bagian humas yaitu : Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi, Sub Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Data, dan Sub Bagian Publikasi dan Media Elektronik.

- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

Sub bagian pengumpulan informasi dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan berita dan informasi, peliputan dokumentasi dan penyebarluasan informasi melalui media cetak maupaun melalui media teknologi informasi, untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah, program kerja, pembangunan dan kegiatan pemerintah, dan mendistribusikan bahan-bahan penerbitan serta mengkoordinasikan dokumentasi pelaksanaan tugas bidang kehumasan.

b. Sub Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Data

Sub bagian pemberitaan dan pengelolaan data mempunyai tugas melakukan urusan peliputan, pemberitaan, dan mengelola data serta mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan pekerjaan.

c. Sub Bagian Publikasi dan Media Elektronik

Sub bagian publikasi dan media elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasi kegiatan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan hubungan kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun dalam bentuk publikasi media elektronik.

3. Tupoksi Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara

Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas yaitu, melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang informasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi antara lain ialah:

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan dan program kerja bagian humas berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja. Menyusun bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan masyarakat dan hubungan kelembagaan.
- b. Penyimpan bahan pembinaan dan pengamanan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.
- c. Pelaksanaan hubungan media massa dan pers, peliputan dan pemberitaan dan menganalisa informasi untuk penerangan, penerbitan, publikasi, dan dokumentasi informasi komunikasi.
- d. Melaksanakan kegiatan dan program kerja pengolahan data elektronik, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.

4. Standar Pelayanan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan standar pelayanan.

Standar pelayanan pada bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

1. Standar pelayanan pendokumentasian naskah, foto, dan audio visual;
2. Standar pelayanan peliputan kegiatan pimpinan daerah;
3. Standar pelayanan pengumpulan dan pemantauan berita media cetak;
4. Standar pelayanan konsultasi/audiensi Standar pelayanan penyusunan pidato;
6. Standar pelayanan pengelolaan data elektronik;

7. Standar pelayanan iklan layanan masyarakat;

Standar pelayanan yang dimaksud di atas digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggaraan aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau ingin mengajukan suatu permohonan maka masyarakat hendak langsung ke kantor Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu atau daftar tamu, seperti mekanisme di bawah ini : Keterangan dari mekanisme diatas :

- 1) Pemohon/masyarakat/penggunakan layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada bupati aceh tenggara u.p. kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, atau
- 2) Pemohon/masyarakat/pengguna layanan datang langsung ke bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (ke bagian yang menangani dokumentasi dan informasi yang diperlukan) dengan menunjukkan identitas pribadi atau instansi.
- 3) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bagian humas yang membidangi dokumentasi naskah, foto, dan audio visual yang dibutuhkan.
- 4) Kepala bagian yang bersangkutan memberikan dokumentasi naskah, foto, dan audio visual yang dibutuhkan kepada pemohon/masyarakat/pengguna layanan.

- 5) Kepala bagian yang bersangkutan mendisposisikan/menugaskan kasubbag/pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan dokumentasi naskah, foto, dan audio visual yang dibutuhkan.
- 6) Kasubbag/pejabat/pegawai yang ditunjukan melaksanakan tugas memberikan informasi kepada pemohon/ masyarakat/pengguna layanan. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya ditempatkan di ruangan yang terletak di lantai 2 dan dibagi menjadi 2 ruangan. Ruangan kepala yang dilengkapi satu stel kursi dan meja, telepon dan dua buah lemari.

2. Ruangan komputer dan ruangan kasubbag dan staf humas disatukan menjadi satu ruangan. Dilengkapi sembilan unit komputer dan printer serta satu dispenser, masing-masing dilengkapi satu stel kursi dan meja, dan dua buah lemari disertai dua buah tempat koran dan tabloid. Serta dilengkapi dengan alat penunjang untuk kelancaran kerja dan tugas Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara, di antaranya adalah :

1. Satu unit mobil operasional.
2. Sembilan unit komputer, sembilan unit printer dan satu unit printer foto.
3. Tiga kamera video dan tiga buah kamera digital.
4. Ke sembilan komputer terhubung dengan jaringan internet.

5. Hasil Penelitian

- a. Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Menyebarkan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, untuk pengembangan

pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu penyebarluasan informasi menjadi mutlak bagi pemerintah sebab penyediaan dan pelayanan segala jenis informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Bahkan dalam Undang-Undang No 14 tahun 2008 menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara.⁴⁸ Perubahan sistem politik dan pemerintahan yang semakin mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan dan demokratisasi dalam keseluruhan langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah, membawa pengaruh yang cukup berarti terhadap mekanisme dan budaya kerja aparatur pemerintah pada berbagai level dan di bidang pengabdian. Humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan asisten administrasi umum pemerintah, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menciptakan suasana yang harmonis antar pegawai, serta sebagai penghubung bagi pemerintah dalam menginformasikan semua kebijakan pemerintah dan informasi program kerja kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Secara fungsional Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran di antaranya :

- a. Pihak humas berupaya memberikan informasi sesuai dengan kebijakan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat.
- b. Pihak humas wajib menyerap keinginan publik yang diselenggarakan bagi kepentingan lembaga dan demi tercapainya tujuan bersama Dalam menyampaikan informasi program kerja kepada masyarakat tentu humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tenggara harus lebih meningkatkan upaya kesadaran masyarakat terhadap program kerja pemerintah, dalam hal ini tentu peran strategi sangat penting dalam merencanakan guna membantu pelaksanaan tugas maupun fungsi kehumasan dalam memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat. Hasil kegiatan wawancara penulis dengan Bapak Dedy Jefernai ST selaku Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi, mengatakan bahwa : “Humas Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat luas terutama masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yaitu melalui media massa, baik cetak maupun media teknologi informasi seperti media sosial, dan media online. Dimana semua media kita berikan informasi baik itu informasi tentang kegiatan pemerintah, pembangunan, program kebijakan dan program kerja, untuk dapat disampaikan kepada masyarakat luas”.⁴⁹Berdasarkan observasi selama penelitian peneliti menemukan bahwa, selain melalui media massa yang ada, humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tenggara juga

menggunakan strategi lainnya di dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah diantaranya adalah :

1. Baliho dan Spanduk

Baliho dan spanduk digunakan juga dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Baliho dan Spanduk tersebut langsung didesain oleh staf humas bagian informasi dan dokumentasi. 2. Tabloid Tabloid juga menjadi salah satu sarana humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Seperti tabloid Gema Aceh.

Pernyataan di atas, juga didukung dengan hasil wawancara Bapak Amril Nuthihar, S.Ip, MAP selaku kepala bagian Humas pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang mengatakan bahwa :

“Dalam mendukung kegiatan humas dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah daerah pihak kami melakukan empat hal agar informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat diantaranya :

- a. Bekerja sama dengan wartawan, baik media cetak maupun media elektronik dalam menyebarkan informasi program kerja kepada masyarakat.
- b. Melengkapi fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan humas
- c. Penggunaan Media sebagai alat komunikasi agar lebih efektif dalam penyampaian informasi tentang program kerja kepada masyarakat.
- d. Penggunaan media dalam menyampaikan informasi sangat penting bagi pemerintah. Lebih lanjut Bapak Amril Nuthihar, S.ip, MAP selaku kepala bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan

bahwa : “Untuk bekerja sama dengan media massa, baik media cetak maupun teknologi informasi, yaitu dengan cara pihak humas memberikan informasi atau berita tentang pemerintah kepada setiap media yang ada untuk dapat dipublikasikan. Keterlibatan media sangat menguntungkan pihak humas karena pada dasarnya sangat sulit untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di setiap wilayah, dapat dikatakan dengan keterlibatan media dapat menjangkau seluruh masyarakat baik di kota maupun di pelosok desa di Kabupaten Aceh Tenggara”.

Lebih lanjut Bapak Dedy Jefernai, ST selaku sub bagian informasi dan dokumentasi, mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kerja pemerintah daerah adalah dengan membuka website pemerintah atau website Humas yang berisikan tentang tanggapan masyarakat terhadap pemerintah daerah”.

Lebih lanjut Bapak Amril Nuthihar, S.ip.MAP selaku kepala bagian humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa :

“Humas memberikan pelayanan di bidang informasi kepada masyarakat secara mudah, cepat dan tepat, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan informasi atau ingin mengajukan suatu permohonan maka masyarakat hendak langsung ke Kantor Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu atau daftar tamu”.

Lebih lanjut Bapak Dedy Jefernai, ST selaku sub bagian informasi dan dokumentasi mengatakan bahwa :

“Didalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kerja pemerintah daerah Humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara tidak bisa terlepas dari dukungan dan peran serta berbagai media, baik media cetak maupaun media elektronik. Dengan penggunaan media tersebut, Humas Sekretariat Kabupten Aceh Tenggara dapat bisa menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Agar semua masyarakat mengetahui dan memahami semua bentuk program kerja pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun media cetak sebagai sarana penyebarluasan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat yang digunakan pihak Humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara yaitu seperti surat kabar harian yang terdiri dari : Harian Aceh, Antaranews, Serambi indonesia, Modusaceh, Harian Prohaba.”

Lebih lanjut Bapak Dedy Jefernai, ST selaku sub bagian informasi dan dokumentasi mengatakan bahwa :

“Untuk membantu kelancaran kerja Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah kepada masyarakat pihak humas juga menggunakan media teknologi informasi di antaranya :

- a. Media online Terdiri dari: website pemeritah, Harian Aceh, Antaranews, Serambi indonesia, Modusaceh, Harian Prohaba, Aceh image, Bisnis tempo, meulaboh post,detiknews, kompas, akurat, suaranews, tribunnews. 2. Media sosial Terdiri dari : Youtube Humas Acehtenggara, Whatshapp, Facebokk

Humas acehtenggara, Instagram Humas acehtenggara, email humas@acehtenggarakab.go.id, Twiter @humas_AcehTenggara”.

Lebih lanjut Bapak Amril Nuthihar, S.IP, MAP selaku kepala bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa : “Humas juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dalam menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah daerah. Kepala Humas harus mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh stafnya dalam menyampaikan informasi program kerja yang ada di pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara”.

Lebih lanjut Bapak Amril Nuthihar, S.IP, MAP selaku kepala bagian humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara mengatakan bahwa :

Dalam menjalankan tugas pokok Humas sekretariat Kabuptaen Aceh Tenggara khususnya dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah, yaitu dengan berpedoman pada tupoksi bagian, dengan tujuan Humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara berusaha untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dalam mensukseskan program kerja pemerintah daerah”.

- a) Hambatan Dalam Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Menyebarluaskan Informasi Tentang Program Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan di bagian humas sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat strategi humas dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat di antaranya adalah :

- 1) Terbatasnya tenaga pegawai di lapangan, sehingga tidak dapat memaksimalkan kinerja humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara.
- 2) Angka melek huruf yang masih cukup tinggi dalam masyarakat, membuat pihak humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara tidak bisa memaksimalkan kinerjanya, karena dipengaruhi oleh sebagian masyarakat yang masih kurang mampu dalam penggunaan teknologi informasi.

H. Pembahasan

Setelah data disajikan selanjutnya data Tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi program kerja pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model interaktif yaitu terkaid dengan pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Jadi analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data .

1. Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah. Keberadaan humas di lembaga pemerintah merupakan suatu keharusan dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan informasi baik itu tentang kegiatan, program kebijakan, program kerja, maupun pembangunan yang akan ditujukan kepada masyarakat. Peran humas di lembaga pemerintah sangat berkaitan dengan tujuan utama yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, pada dasarnya humas harus bisa

memberikan identitas organisasinya dengan tepat dan benar, serta mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan kepada pemerintah.

Program kerja pemerintah akan berjalan dengan baik apabila terjadi pengertian antara pemerintah dengan masyarakat, dimana humas merupakan wadah yang memiliki fungsi dan tugas pokok sebagai pemberi informasi dan dorong bagi pemerintah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kerja yang telah ditetapkan. Strategi merupakan panduan awal dari perencanaan manajemen yang akan maupun telah direncanakan melalui kebijakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam menyebarkan informasi pemilihan strategi harus ditentukan, agar informasi program kerja pemerintah daerah yang disebarluaskan oleh Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dapat tersampaikan tepat pada sasaran yang diinginkan dan dapat diterima oleh semua khalayak. Strategi dapat dikatakan juga sebagai rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam lembaga humas, terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat. usaha tersebut untuk menanamkan kesan yang menyenangkan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan jujur, sehingga publik dapat menaruh kepercayaan kepada pemerintahnya dan ikut serta dalam usaha yang direncanakan pemerintah.

Dari penjelasan diatas, Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan tugas maupun fungsinya dengan semaksimal mungkin,

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Dedy Jefernai ST selaku Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi, yang mengatakan bahwa Humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara akan selalu menginformasikan program kerja pemerintah kepada masyarakat dengan memilih strategi yang benarbenar efektif agar informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan media massa, baik cetak maupun teknologi informasi seperti media sosial, dan media online.

Informasi yang disampaikan oleh Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan fakta yang ada. Karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Sehingga masyarakat diharapkan dapat ikut serta dan berperan aktif dalam program kerja pemerintah.:

1) Pemanfaatan Media Massa

1. Media Online

Pada era globalisasi saat ini teknologi berkembang sangat cepat hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan informasi semakin hari semakin meningkat, informasi tersebut tentunya diperoleh melalui media salah satunya media online. Media online merupakan media berbasis telekomunikasi dan multimedia yang hanya bisa diakses melalui internet. Jenis media online yang dimiliki pihak humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarkan informasi terdiri dari: website pemerintah, media pemberitaan seperti Harian Aceh, Antaranews, Serambinews, Modus Aceh, Harian Prohaba,

Aceh Image, Bisnis Tembo, Meulaboh Post, Detiknews, Kompas, Akurat, Suaranews, Republiknews.

2. Media Sosial

Media sosial adalah media komunikasi melalui dunia maya tanpa harus mengenal jarak dan bisa dipergunakan oleh semua khalayak. Dengan berkembangnya media sosial yang muncul dalam masyarakat dapat menguntungkan banyak pihak seperti pihak humas sebagai pusat informasi publik. Pada dasarnya Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara telah memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Bentuk media sosial yang dimiliki yaitu terdiri dari : Youtube Humas Aceh Tenggara, Whatsapp, Facebook Humas Acehtenggara, Instagram Humas Acehtenggara, Email Humas@Acehtenggarakab.go.id, Twitter @Humas_Acehtenggara.

3. Media cetak

Media cetak merupakan media yang berbentuk lembaran dengan jumlah kata, gambar, atau foto. Fungsi utama dari media cetak ini adalah memberi informasi dan sekaligus menghibur. Media cetak merupakan media massa yang ketiga yang digunakan pihak Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarkan informasi. Bentuk dari media cetak itu sendiri yaitu seperti surat kabar harian, spanduk, baliho, dan tabloid. Surat kabar harian merupakan salah satu media informasi yang digunakan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarkan informasi diantaranya surat kabar harian seperti Harian Aceh, Antaranews, Serambinews, Modusaceh, Harian Prohaba, Republiknews. Media cetak yang lainnya seperti baliho, spanduk dan tabloid juga

menjadi tempat Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi publik.

2) Bekerja Sama Dengan Wartawan Media Massa

Dalam menyampaikan informasi ke pada masyarakat Humas sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara menjalin kerja sama yang baik dengan wartawan media massa atau dengan media massa, dengan cara memberikan setiap informasi atau berita baik itu kegiatan, kebijakan, program kerja maupun pembangunan pemerintah untuk dapat dipublikasi dan disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara karena media massa merupakan saluran penyampaian informasi yang sangat efektif yang dapat mencapai jumlah massa yang besar serta lebih cepat.⁵⁸ Sasaran yang akan dituju Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara adalah menjalin hubungan komunikasi yang baik yang efektif dengan masyarakat serta menjalin kemitraan dengan media massa, dengan cara memberikan salinan informasi atau berita kepada setiap media yang ada untuk dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Selain itu juga Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara menginformasikan program kerja secara aktual melalui media massa, baik media cetak maupun media teknologi informasi seperti media online dan media sosial. Hal ini dilakukan Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka memberikan informasi tentang program kerja pemerintah daerah, agar masyarakat mengetahui tentang program kerja yang ada dan pada akhirnya masyarakat ikut serta dalam memberikan masukan dan kritikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Dapat disimpulkan bahwa Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya berfungsi sebagai corong bagi pemerintah dalam menyebarluaskan informasi program kerja, akan tetapi Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara juga harus dapat ikut serta dalam memikirkan masalah-maslah yang dihadapi oleh pemerintah, sehingga humas mampu memberi penjelasan-penjelasan kepada masyarakat. Hambatan dalam strategi pemerintah kabupaten aceh tenggara dalam menyebarluaskan informasi tentang program kerja pemerintah daerah Terbatasnya kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu hambatan yang mendasar bagi Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarluaskan informasi progarm kerja pemerintah daerah kepada masyarakat, disebabkan angka melek hruf yang masih cukup tinggi dalam masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, maka akan menjadi hambatan dalam strategi informasi yang ditetapkan oleh Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara, seperti media online dan media sosial.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di bagian Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dapat disimpulkan bahwa Strategi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya bagian humas Dalam Menyebarkan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara di antaranya sebagai berikut :

- a. Melalui media massa, seperti media cetak dan media teknologi informasi, seperti surat kabar harian, baliho, spanduk, tabloid, media online dan media sosial.
- b. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara juga melakukan rencana yang optimal sebelum informasi program kerja disampaikan kepada masyarakat.
- c. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara juga menyajikan berita-berita seputar kegiatan yang telah dilaksanakan melalui website pemerintah sehingga informasi bisa cepat sampai kepada masyarakat.
- d. Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara juga bekerjasama dengan wartawan serta dengan media massa agar informasi program kerja pemerintah dapat tersampaikan ke semua masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Hambatan yang terdapat dalam strategi pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyebarkan informasi program kerja

pemerintah, yaitu latar pendidikan yang berbeda serta terbatasnya jumlah pegawai dilapangan.

C. Saran

Saran dan masukan bagi pihak Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjalankan strategi dalam menyebarkan informasi program kerja pemerintah yaitu:

- a. Perlu diupayakan suatu strategi baru dalam menyampaikan informasi pemerintah daerah, sehingga informasi yang disebarluaskan dapat lebih cepat dan tepat diterima oleh masyarakat.
- b. Perlu diupayakan untuk menambah jumlah pegawai humas dilapangan untuk mempublikasikan setiap agenda pemerintah. Pada dasarnya harus memiliki potensi dan benar-benar menguasai tugas dari pada humas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nana, Herdiana, 2015, *Manajemen Pemasaran Strategi*. Pustaka Setia Bandung.
- Abdullah, Rozali, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo Jakarta,
- Butterick, Keith, 2014, *Pengantar Public Relations Dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Coulson, Thomas Chollin, 2012 *pubik relation : pedoman praktis untuk humas* Bumi Aksara Jakarta.
- Ceverthorn, Peter, 2015, *Manajemen Library The Essential Guide To Brand Manajemen*, Kogan Page India Pvt. Ltd New Delhi.
- Forum, Humas, Indonesia, 2012, *Reposisi Publik Relations Dalam Era Baru Indonesia*, Jakarta.
- Iriantara, Yosali, 2008, *Media Relations Konsep, Pendekatan, Dan Praktik*, Simbosa Rakatama Media, Bandung.
- Kriyantono, Racmad, 2015, *Public Relation Writing*. Kencana Jakarta.
- M. Yunup, Pawit, 2010. *Ilmu Informasi, Komunikasi, Dan Perpustakaan*, PT Bumi Aksara Jakarta.
- Moch, Irfan, Rusdiana, 2014, *Sistem Informasi Manajemen*, Cv Pustaka Setia Jakarta.
- Mukarom, Zainal, Wijaya, Laksana, Mahibubuddin, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik*, Cv Pustaka Setia Bandung.
- Rachmat, Gunawan, Dadang, 2016, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cv Pustaka Setia Bandung.
- Ruslan, Rosady, 2015, *Manajemen Publik Relations Dan Media Komunikasi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada) hal. 26 Susanto, Bg, *Manajemen Startegi Komprehensif*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Sugiono, 2012 *Penelitian Kualitatif Dan R7D*, Alfabeta Bandung.
- Tjiptono, Fandi. 2012, *Pemasaran Strategik*, C.V Andi Offset Yogyakarta.
- Widjaja, H.A.W, 2014, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 56

Sumber Lain

Audah, Mannan, Mutmainnah, “Aktifitas Humas Pada Bidang Pengaduan Pemerintah Kota Makasar Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah” *Ejurnal komudifikasi, Volume 5.*

Muhammad Aras, “Kegiatan Government Publik Relation Dalam Membangun Kominikasi Dengan Dunia Persamaa”, *Jurnal Marketing Komunikation Dapartermen Fakulti Of Ekonomic And Comunication.*

Rio, Muhammad, “penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Klanten” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*

Wawan, Wahyudi, “Strategi Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Informasi dan Ilmu Politik, Vol. 5, No.2.*

Yus, Sugianto, Posu, “Kinerja Bagian Humas Dalam Dalam Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah” *Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2019. Sumber Penerbitan Online.*

Husaeri, Priatna, *Program Kerja*, Diakses pada tanggal 27 Maret 2019 dari situs <https://www.sildeshere.net>.

Media Online, Diakses Tanggal 15 September 2019 dari situs <http://www.romelteamedia.com>.

Media Sosial, diakses pada tanggal 15 September 2019 dari situs <http://prezi.com/vddmcub-s/sosial-nedia-definisi-fungsi-karakteristik>

Perspektif Baru Bisnis Dan Ekonomi, Program Kerja Jadi Syarat Sukses Berbisnis, Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2019 dari situs <https://www.wartaekonomi.co.id>

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Peluncuran Daftar Informasi Publik Kabupaten Aceh Tenggara, Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2020 Dari Situs <https://aceh.antaranews.com>

UKM KSR PMI Unit UNITA, Program Kerja, Diakses Pada Tanggal 21 Maret 2019 dari situs <http://www.bimbingan.org/>

Website, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Lauching Daftar Informasi Publik (DIP), diakses pada tanggal 13 januari 2020 dari situs <http://acehtenggara.go.id>

Sumber Penerbitan Pemerintah Badan Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

LAKIP Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara 2018.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia, Permendagri, Nomor 13 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Aceh Barat No 22 Tahun 2015 Tentang RKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016.

RPJM Bidang Cipta Karya Kabuapten Aceh Barat. RPJM pemerintah kabupaten Aceh Tenggara tahun 2012-2016.